BAB I
PENDAHULUAN

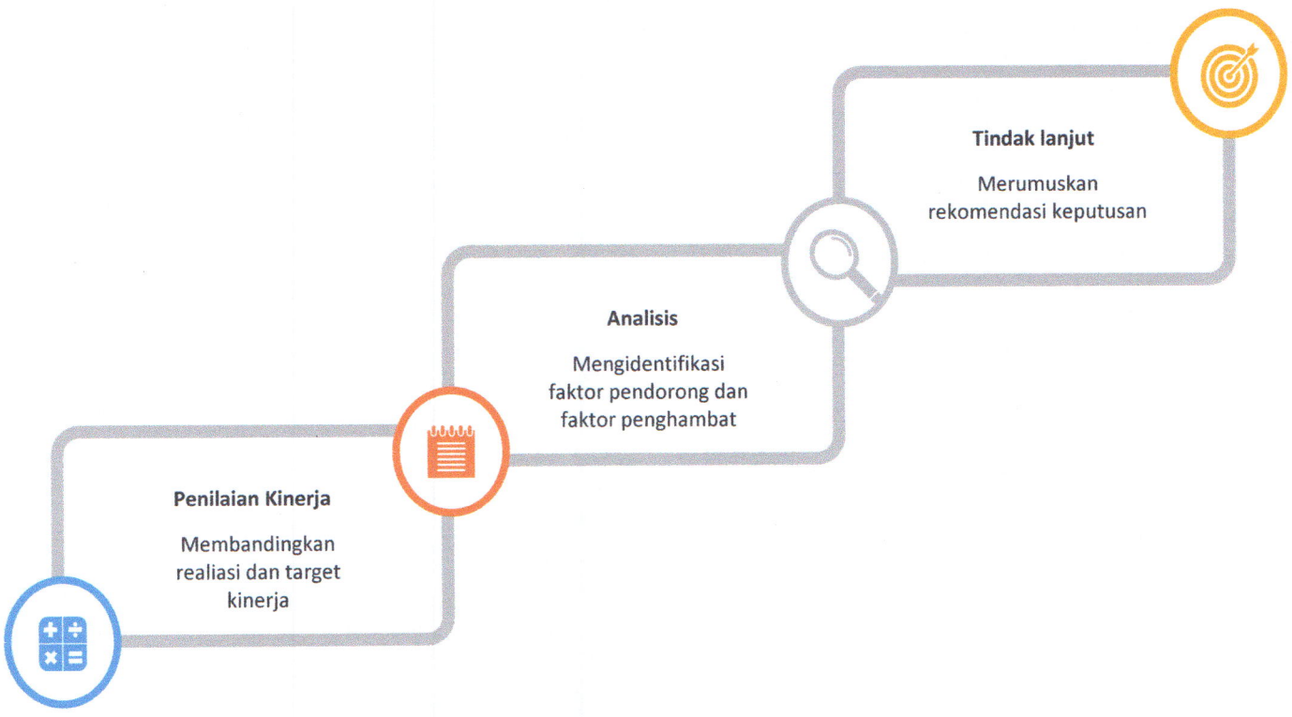
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Tribulan III bulan Juli s/d September , melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tribulan III Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi factor- faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2025 menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

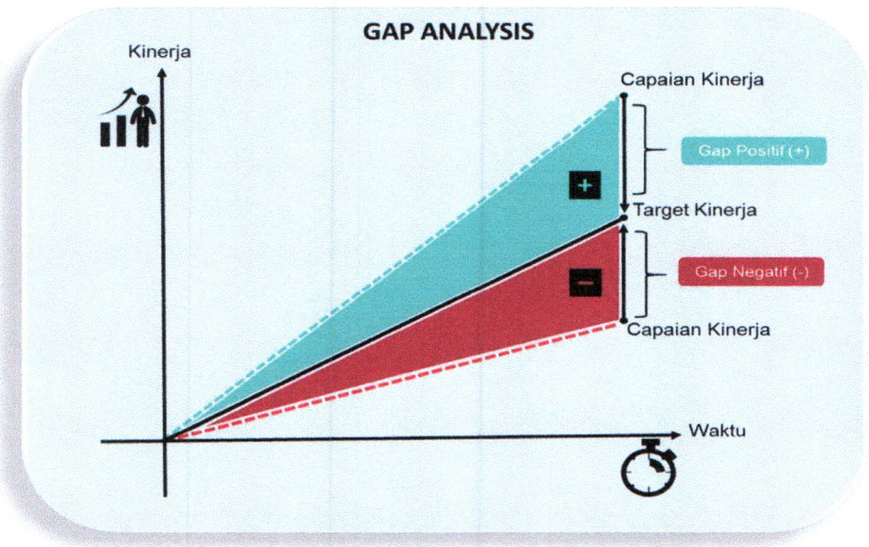
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



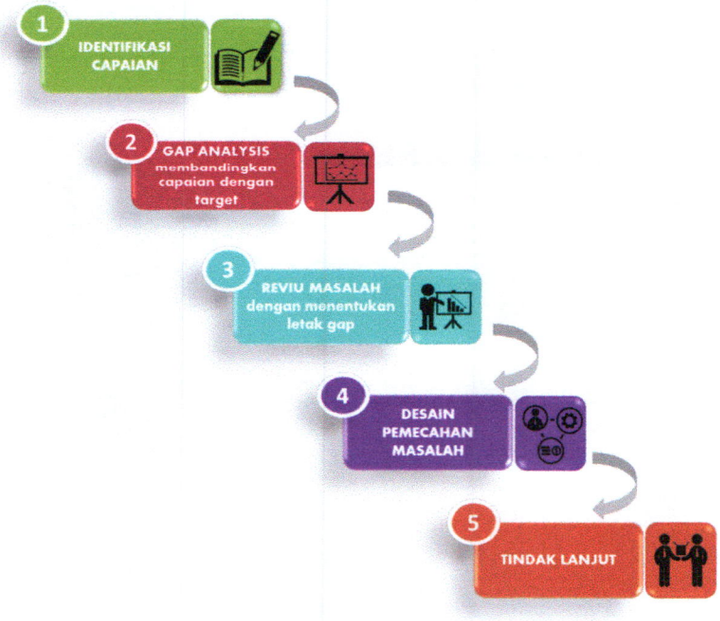
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Umum serta pelindungan masyarakat		Nilai Indeks PKKU	61	65 Dasar Hasil Penghitungan Indeks IPKKU tahun 2025 TW II Kemendagri	106
			Nilai Indeks Satlinmas	61	65	
		Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	29	29 %
		Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	28	28%

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025, merupakan hasil pelaksanaan program /kegiatan bulan Juli sampai dengan September 2025. Capaian kinerja yang diukur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya penanganan gangguan trantibum dengan indikator kinerja Prosentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan Formulasi penghitungan :

   Jumlah Gangguan trantibum
   ——————————————————————X 100%
   Jumlah gangguan Trantibum yang diselesaikan

   menggambarkan seberapa besar Penanganan Gangguan Trantibum Tahun 2025 yang diselesaikan . Pada Triwulan III Tahun 2025, gangguan Trantibum yang dapat ditangani sebanyak 29 % dari target 100 % per tahun yang ditentukan pada restra Perangkat Daerah sehingga capaian kinerja pada sasaran satu di Tribulan III satu 29 %.

2. Sasaran meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada dengan indikator kinerja persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan formulasi penghitungan :

   Jumlah gangguan perda dan perkada
   —————————————————————— X 100%
   Jumlah gangguan perda dan perkada yang ditegakkan

   menggambarkan seberapa besar Penanganan Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan . Pada Triwulan III Tahun 2025, Penegakan Perda yang dapat ditegakkan sebanyak 28 % dari target 100 % per tahun yang ditentukan pada restra Perangkat Daerah sehingga capaian kinerja pada sasaran dua di Tribulan III satu 28 %.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**380**	**192**	**50 %**
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu**	**11 Dokumen**	**9 Dokumen**	**81 %**
	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	5 Dokumen	83 %

	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Jumlah Dukumen RKASKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dok	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dok	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dok	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dok	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Penatausahaan yang disusun secara tepat waktu**	**72 dokumen**	**63 dok**	**87 %**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang	50 orang	96 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	0 Dok	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	13 dok	72 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Darrah		**-**	**-**	**Recofusing**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Recofusing
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**162**	**92**	**56 %**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	3 Paket	75 %

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100 %
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100 %
	Penyediaan bahan bacaan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang –Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	36Laporan	6	16 %
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	64 Laporan	59 %
	Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinas Pada SKPD	7 Dokumen	7 dok	100 %
	Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**2**	**0**	**0 %**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	Recofusing
	Pengadaan Mebel		-	-	Recofusing
	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	0	Recufusing
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan tepat waktu**	**5 jenis**	**5 Jenis**	**100 %**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1laporan	1laporan	100 %
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah Lporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Listrik yang disediakan	2laporan	2laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 laporan	1 lap	50%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah dan Jenis barang milik daerah dalam kondisi baik**	**39 unit**	**21 unit**	**53 %**

	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	18 unit	50 %
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor yang terawatt	2	2	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang tertangani**	**1854 dok**	**755**	**40 %**
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	**Jumlah Kasus gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani**	**1744**	**690**	**39 %**
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	9 dok	5 dok	55 %
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertertiban Umum	44 dok	30 dok	68 %
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	454 dok	283 dok	62 %

	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11 dok	11 dok	100 %
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-	-	Recufusing
	Peningkatan Kapaditas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat		-	-	Recofusing
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah laporan penindakan gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkaa melalui penertiban dan penangganan unjuk rasa dab kerusuhan masa	-	-	Recofusing
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengamanan dan Pengawalan	500 lap	313 lap	62 %
	Penindakan Gangguan Ketentraman an Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan massa yang dilakukan Penindakan	90 lap	47 lap	52 %

	Penyediaan Layanan alam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah layanan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	25 lap	0	0 %
	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	1 unit	1	100 %
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Jumlah Pelanggaran Perda yang tetangani**	**99**	**65**	**65 %**
	Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peratura Kepala Daerah	2 laporan	0	0 %
	Penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 laporan	20	100 %
	Dukungan pelaksanaan sidang atas pelanggaran peraturan daerah	Jumlah Perkara yang dapat disidangkan	-	-	Recofusing
	Pemberkasan Administrasi penyidik oleh PPNS penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda	-	-	Recofusing
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/Kelompok masyarakat/Pelaku Usaha	5 laporan	3	60%
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	22 laporan	18	81 %

	Pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	46 laporan	24	52 %
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**-**	**-**	**recofusing**
	Pembentukan secretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	-	-	recofusing
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-	-	recofusing
	Pembentukan PPNS penegak perda	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	-	-	recofusing
	Dukungan Operasional sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	-	-	recofusing
	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-	-	recofusing

Dalam Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran Meningkatnya Penanganan gangguan Trantibum dan Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada dengan outcome Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah maka dapat dijelaskan beberapa Sub Kegiatan yang mendukung Program tersebut diatas:

1. **Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** indikator Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebanyak 16 dokumen antara lain:

- Dokumen LKjIP
- Dokumen LPPD
- Dokemen LKPJ
- Dokumen Renja 2026
- Dokumen Perubahan Renja 2025
- Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB I

- Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB II
- Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB III
- Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi TB IV
- Dukumen SPM
- Dokumen SAKIP
- Dokumen PUG
- Renstra 2025-2030
- Dokumen Laporan Keuangan
- Dokumen Laporan Tribulan
- Dokumen Evaluasi Internal

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** , dengan Indikator Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjungan ASN yaitu sebanyak 53 0rang , Dokumen administrasi Gaji dan Tunjangan ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk.
3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan dengan Indikator , Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan Kantor yang disediakan, Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan, Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan, Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan, Jumlah dokumen Bahan Bacaan Perundang undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
4. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan Indikator Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan,Jumlah Paket Meble yang disediakan, Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan
5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrikyang disediakan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat.
6. **Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** dengan Indikator Jumlah Kendaraan dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, Jumlah Asset tetap lainnya yang dipelihara, Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi, Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi, Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, Jumlah meble yang dipelihara.

Dalam Pelaksanaan Tugas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung 2 Sasaran yang ingin dicapai didudukung oleh :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Outcome Meningkatnya penindakan gangguan Trantibum berikut capain dengan Kegiatan

Kegiatan A : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu (1) Daerah Kabupaten /Kota dengan menyesuaikan anggaran recufusing sesuai dengan Keputusan Presiden No 1 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Koordinasi Trantibum Kabupaten/Kota yang ada Di wilayah Provinsi Jawa Timur serta Satpol PP Provinsi untuk meningkatkan Penyelenggaran Trantibum di Daerah, Kegiatan ini di anggarkan Rp. 5.591.250,- dan teralisasi Rp. 3.354.250,- atau sekitar 59,99 %
2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Peningkatan SDM Linmas di Tingkat Kecamatan peserta dari masing masing Desa di seluruh kecamatan .Dianggarkan sebesar Rp. 66.271.300,- dan teralisasi Rp. 45.250.000,- atau sekitar 62,30 %.
3. Kerjasama Antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kemitraan dengan Dinas Samping Polres, Kodim , Kejaksaan, CPM untuk menjaga Penanganan Gangguan Trantibum. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.311.166.350,- dan teralisasi Rp. 816.803.755,- atau sekitar 62,30 %.
4. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan Kegiatan Lembur Pembuatan SOP Trantibum dan Penegakan Perda. Kegiatan ini dianggarakan sebesar RP. 3.500.000,- dan terealisasi Rp3.199.000,-atau sekitar 91,40 %
5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP Fungsional dan uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penjenjangan Karier. (Recufusing)
6. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan Perpindahan jabatan ke jabatan Fungsional Pol PP , Promosi dan kenaikan Jenjang Jabatan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Karier bagi fungsional Satpol PP yang sudah memenuhi persyaratan untuk pengalihan jabatan Fungsional yang lebih tinggi. Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 14.460.000,- dan terealisasi 0 atau sekitar 0 %

7. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka membantu ketentraman dan ketertiban Umum yang ada di masyarakat , serta penanggulangan bencana. (Recufusing)
8. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Satpol PP dan Satlinmas Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas dalam rangka Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum. (Recufusing)
9. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini cegah dini, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli dan Pengamanan kegiatan ini dilaksanakan untuk antisipasi Ketentraman dan Ketertiban umum dengan kegiatan Patroli Wilayah di daerah rawan gangguan trantibum yang ada dikabupaten Nganjuk, serta Pengamanan dan Pengawalan Bupati dan Pejabat Negara lainnya serta pengamanan asset Daerah, dan Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 665.900.300,- terealisasi sebesar Rp 416.339.930,- atau sekitar 41 %
10. Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Unjuk rasa dan kerusuhan massa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk Penertiban dan Pelanggaran Perda yang ada di masyarakat sesuai dengan SOP dan tugas Pokok fungsi Satpol PP, serta kegiatan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang berpotensi menggangu Ketentraman dan Ketertiban Umum . Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 88.611.500,- teralisasi sebesar Rp. 45.846.400,- atau sekitar 51,74 %.
11. Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda
    Kegiatan ini dilaksanakan untuk Pemberian bantuan kepada warga yang terdampak akibat dari Penegakan Hukum, Radius 50 m dari tempat kejadian Penegakan Perda. Di di anggarkan sebesar Rp. 2.500.000,- dan teralisasi Rp. 0 atau 0 %
12. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi sarana dan prasarana trantibum dimana Satuan Polisi Poamong Praja sebagai garda terdepan Penegakan Perda masih banyak sapras yang belum sesuai dengan amanat Permendagri No 121 Tahun 2018 tentang STANDAR TEKNIS MUTU PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. Dianggarkan sebesar Rp. 119.829.000 dan teralisasi Rp.12.378.000,- atau 10,33 %.

Kegiatan B : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan :

1. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Derah dan Peraturan Kepala Daerah kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan Pembinaan serta Penyuluhan kepada masyarakat pelanggar perda, pada waktu pelaksanaan operasi Pelanggaran Perda berlangsung. Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 5.060.000 dan terealisasi Rp. 0 atau 0 %.
2. Penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberkasan pelanggaran Perda , Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi 10.000.000 atau 100 %..
3. Dukungan pelaksanaan sidang atas pelangaran Peraturan Daerah kegiatan ini dilaksanakan untuk pemberkasan penyidikan kepada masyarakat pelanggar Perda yang akan diberikan saksi. (Recufusing)
4. Pemberkasan administrasi penyidik pegawai oleh PPNS Penegak Perda kegiatan ini di laksanakan untuk untuk melakukan lembur dalam rangka pemberkasan kepada warga masyarakat pelanggar Perda. (Recufusing)
5. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada warga masyarakat ketentuan perundang-undangan baik tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3) . Kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp. 332.041.850,- dan terealisasi 220.211.200 atau 66,32 %
6. Penanganan Atas Pelanggaran Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

   Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Penangan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pelanggar Perda. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 578.805.000,- terealisasi Rp. 438.531.250,- atau sekitar 75,76 %.
7. Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

   Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberiakan Pengawasan Kepada masyarakat Pelanggar Perda atau Badan Usaha, sehingga tidak lagi muncul kegiatan yang sama dengan pelaku yang sama. Dianggarkan sebesar Rp. 31.007.800,- dan teralisasi sebesar Rp. 15.675.000,- atau sekitar 50,55 %

Kegiatan C : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sub Kegiatan :

1. Pembentukan secretariat PPNS kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Pelaksanaan kegiatan Pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat (Recufusing)
2. Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

   Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kemitraan dengan Dinas luar PPNS

3. Pembentukan PPNS Penegak Perda kegiatan ini dilaksanakan untuk bimbingan Teknis PPNS Penegak Perda . (Recufusing)
4. Dukungan Operasional secretariat PPNS kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan dukungan Operasional PPNS . (Recufusing)
5. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS kegiatan ini dilaksanakan untuk mengembangkan kapasitas PPNS. (Recufusing)

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Tujuan : Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Umum serta pelindungan masyarakat Sasaran : 1. Meningkatnya Penanganan gangguan trantibum 2. Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	1. Tersedianya Dukungan Anggaran dari APBD 2. Adanya Regulasi daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi 3. Peningkatan Kapasitas dan Jumlah anggota Satpol PP 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan Peraturan Daerah dan penciptaan Ketentraman dan Ketertiban 2. Belum adanya regulasi yang kuat sesuai dengan situasi dan kondisi daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi

III.2 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam table berikut :

No.	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	Dukungan Anggran dari APBD	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	Dukungan Anggran dari APBD	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Dukungan Anggran dari APBD	
1.05.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	Dukungan Anggran dari APBD	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan Anggaran dari APBD	Sistem SIPD yang terlalu sering mengalami down grade
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	Hanya dapat mengakses SIPD pada malam hari s/d dini hari
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	Sering mengalami perubahan Versi sehingga perlu penyesuaian kembali terhadap Aplikasi yang telah diperbaharui atau diganti
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	Sistem Pada DUBB yang belum Optimal sehingga data yang sudah dimasukan tidak tersimpan

1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan Anggaran dari APBD	Sistem Pada DUBB yang belum Optimal sehingga data yang sudah dimasukan tidak tersimpan
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Dukungan Anggaran dari APBD	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan Anggaran dari APBD	Sistem Aplikasi SIPD yang lemot,akses bisa sering pada malam hari
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	SIPD sering mentenen
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD	Dukungan Anggaran dari APBD	SIPD sering mentenen
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Dukungan Anggaran dari APBD	
1.05.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dukungan Anggaran dari APBD	Kesulitan mencari Penyedia yang barangnya ber TKDN
1.05.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Dukungan Anggaran dari APBD	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya anggaran dari APBD	Proses pengadaan barang sesuai di E-katolog
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya anggaran dari APBD	Terjadi eroor pada Sistem E-katolog
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan barang disesuaikan E-katalog

1.05.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan Perundang-undangan	Tersedianya anggaran dari APBD	Banyaknya beredar media yang muncul saat ini pada medsos
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Tersedianya anggaran dari APBD	Jumlah dan waktu kehadiran tamu yang tidak dapat direncanakan
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya anggaran dari APBD	Pelaksanaan kegiatan yang tidak mudah untuk direncanakan
1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya anggaran dari APBD	- Terbatasnya lokasi penyimpanan arsip - Belum adanya petugas kearsipan
1.05.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya anggaran dari APBD	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya anggaran dari APBD	Kesulitan mencari Penyedia yang barangnya ber TKDN
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya anggaran dari APBD	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainya	Tersedianya anggaran dari APBD	Proses pengadaan yang harus disesuaikan dengan E-katalog
1.05.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Aplikasi Srikandi	Sering Terjadi eroor pada Sistem Srikandi
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	Tersedianya Anggaran dari APBD	Sering nya WAFI lemot sehingga mengganggu kineria

1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan jasa yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku
1.05.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan barang/jasa sesuai dengan E-katalog
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan barang/jasa sesuai dengan E-katalog
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya anggaran dari APBD	Penyediaan barang/jasa sesuai dengan E-katalog
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Dukungan Anggaran dari APBD	
1.05.02.2.01	**Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**	Dukungan Anggaran dari APBD	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dukungan Anggaran dari APBD	NIHIL / Tidak ada Faktor Penghambat
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Pengetahuan bagi Anggota Linmas	Belum semua Anggota Linmas dapat tersasar kegiatan tsb dikarenakan terbatasnya Anggaran

1.05.02.2.01.0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan gangguan Trantibum dapat dilaksanakan dengan maksimal dengan dukungan dari dinas samping	Kerjasama yang dilaksanakan selama ini hanya terkait dengan gangguan trantibum belum pada kerjasama terkait dengan Penanganan Pelanggaran Perda
1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Untuk Kelancaran Pelaksanaan TUPOKSI	Penyusunan SOP belum maksimal karena SDM
1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Peningkatan SDM	Kurang minat anggota
1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perindahan jabatan ke jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Peningkatan SDM	Nihil
1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Dukungan Anggaran APBD	Dukungan Anggaran yang minim
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Satpol PP dan Satlinmas	Dukungan Anggaran APBD	Dukungan Anggaran yang minim
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli , Pengamanan dan Pengawalan	Dukungan Anggaran APBD	Kurangnya SMD sehingga Kegiatan Patroli Wilayah tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP

1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Dukungan Anggaran APBD	Masih Banyaknya Masyarakat Pelanggar Perda terkait dengan Anjal gepeng,miras dan PSK
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedianya Anggaran pada APBD	Belum semua masyarakat paham terkait Dampak Penegakan Perda
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Tersedianya Anggaran pada APBD	
1.05.02.2.02	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		
1.05.02.2.02.004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Tersedianya Anggaran pada APBD	Banyak Pelanggar Perda yang ada di Kab. Nganjuk
1.05.02.2.02.007	Penyelidikan terhadap Pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Tersedianya Anggaran pada APBD	Anggara Terecofusing
1.05.02.2.02.008	Dukungan pelaksanaan sidang atas pelanggaran peraturan daerah	Tersedianya Anggaran pada APBD	Anggara Terecofusing
1.05.02.2.02.009	Pemberkasan Administrasi penyidik oleh PPNS penegak perda	Tersedianya Anggaran pada APBD	Anggara Terecofusing
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota	Tersedianya Anggaran pada APBD	Belum semua masyarakat dan pelaku usaha tersasar kegiatan tsb
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Anggaran APBD	Kurangnya PPNS Penegak Perda
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota	Tersedianya Anggaran APBD	Masih banyaknya Pelanggar Perda dari Pelaku Usaha

1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		
1.05.02.2.03.0002	Pembentukan secretariat PPNS	Dukungan Anggaran APBD	Anggaran terecufusing
1.05.02.2.03.0003	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dukungan Anggaran APBD	Anggaran terecufusing
1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Perda	Dukungan Anggaran APBD	Anggaran terecufusing
1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional sekretariat PPNS	Dukungan Anggaran APBD	Anggaran terecufusing
1.05.02.2.03.0003	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Dukungan Anggaran APBD	Anggaran terecufusing

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tribulan III Tahun 2025 antara lain:

Indikator

1. Indikator Nilai Indeks PKKU target 61 teralisasi 65 Dasar Hasil Penghitungan Indeks IPKKU tahun 2025 TW II Kemendagri
2. Indikator Nilai Indeks Satlinmas target 61 teralisasi

Sasaran

1. Meningkatnya penanganan gangguan trantibum dengan Indikator Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan ditargetkan 100 %, dan TB III teralisasi 29 % sehingga Capaian Kinerja pada TB III 29 %
2. Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada dengan Indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan ditargetkan 100 % dan TB III terealisasi 28 % sehingga capaian Kinerja pada TB III 28 %

Capaian realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk s.d. 30 September 2025 sebesar Rp 4.843.449.251,- atau 41 % dari pagu anggaran, Rp. 11.643.279.473,- sehingga sisa Anggaran Rp 6.871.038.036,- atau 59 % anggaran tersisa.

IV.2 Tindak Lanjut

Melakukan Koordinasi dengan PIC di Kementerian Dalam Negeri

IV.3 Rekomendasi

- Kabid Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk kendala dan Permasalahan segera ditindak lanjuti , koordinasi dengan KPPBC Kediri;
- Untuk Laporan dari masyarakat segera ditindaklanjuti baik yang melalui Web maupun WA dan laporan langsung , serta untuk Kegiatan yang belum dilaksanakan segera untuk dilaksanakan pada Tribulan IV.

Nganjuk, 30 September 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005